

# PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Ulupulu: Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo)

Hermanus Reo<sup>1</sup>, Yuliana Sedho<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Flores; [hermanreo23@gmail.com](mailto:hermanreo23@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Flores; [sedhoyuliana@gmail.com](mailto:sedhoyuliana@gmail.com)

	<i>Abstract</i>
<b>Keywords:</b> Accountability; Transparency; Village Financial Accounting System; Village Financial Management.	The aim of the research is to determine the influence of Accountability, Transparency and Village Financial Accounting Systems on Village Financial Management in Ulupulu Village, Nangaroro District, Nagekeo Regency. The type of research used in this research is quantitative research. In this study, a multiple linear regression model test was used. The sampling technique in this research was purposive sampling where the sample determined by the researcher was 94 respondents consisting of the people of Ulupulu village, Nangaroro subdistrict, Nagekeo district who had criteria determined by the researcher. Primary data and secondary data are used by researchers to test several variables, where related data is collected through questionnaire techniques. The research results show that accountability influences village financial management. The test results show that the coefficient value ( $\beta$ ) of the Accountability variable is 0.185 with $t_{count} > t_{table}$ ( $2.105 > 1.98667$ ) and a significant level of $0.038 < 0.05$ . Transparency influences Village Financial Management. The test results show that the coefficient value ( $\beta$ ) of the Transparency variable is 0.209 with $t_{count} > t_{table}$ ( $2.127 > 1.98667$ ) and a significance level of $0.036 < 0.05$ . The Village Financial Accounting System influences Village Financial Management. The test results show that the coefficient value ( $\beta$ ) of the Village Financial Accounting System variable is 0.196 with $t_{count} > t_{table}$ ( $2.022 > 1.98667$ ) and a significant level of $0.046 < 0.05$ .
<b>Kata kunci:</b> Akuntabilitas; Transparansi; Sistem Akuntansi Keuangan Desa; Pengelolaan Keuangan Desa;	<b>Abstrak</b> Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan uji model regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah <i>purposive sampling</i> dimana sampel yang ditentukan oleh peneliti sebanyak 94 orang responden yang terdiri dari masyarakat desa Ulupulu, kecamatan nangaroro, kabupaten nagekeo yang memiliki kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Data primer dan data sekunder digunakan oleh peneliti untuk menguji antara beberapa variabel, dimana data-data terkait dikumpulkan melalui teknik kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil pengujian menunjukkan Nilai koefisien ( $\beta$ ) variabel Akuntabilitas sebesar 0,185 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ( $2,105 > 1,98667$ ) dan tingkat signifikansi $0,038 < 0,05$ . Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil
<b>Diajukan</b> : <b>September 2025</b>	
<b>Diterima</b> : <b>Oktober 2025</b>	
<b>Diterbitkan</b> : <b>Oktober 2025</b>	

---

pengujian menunjukkan Nilai koefisien ( $\beta$ ) variabel Transparansi sebesar 0,209 dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,127 > 1,98667$ ) dan tingkat signifikan  $0,036 < 0,05$ . Sistem Akuntansi Keuangan Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil pengujian menunjukkan Nilai koefisien ( $\beta$ ) variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa sebesar 0,196 dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,022 > 1,98667$ ) dan tingkat signifikan  $0,046 < 0,05$ .

---

Corresponding Author:

Herman Reo

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Flores: [hermanreo23@gmail.com](mailto:hermanreo23@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Eksistensi desa secara yuridis yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 mendeskripsikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengelola urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa merupakan skala terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Namun demikian, peran dari pemerintahan desa sangat esensial dalam otonomi daerah dengan alasan desa memiliki kebebasan dan hak untuk membuat aturan dan regulasi dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah.

Menurut Saputra *et al.*, (2020) desa merupakan pemukiman bagi masyarakat yang tata kelola pemerintahannya dijalankan secara mandiri dan dipimpin oleh kepala desa atau lurah. Arti dari kemandirian itu sendiri bahwa desa berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Maka dari itu dengan adanya otonomi daerah ini mengharuskan desa agar dapat memaksimalkan dalam hal pengaturan tata kelola pemerintahannya dan bagaimana cara mengelola keuangan secara baik dan benar agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Keuangan desa dapat diartikan sebagai semua kewajiban dan hak desa yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak tersebut yang dapat dijadikan milik desa berupa uang atau barang. Pada awal tahun 2015, desa memperoleh sumber anggaran baru yaitu Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tambahan anggaran desa ini berupa Dana Desa yang akan diterima desa secara bertahap. Dana desa dibagikan berdasarkan empat faktor diantaranya yaitu, luas wilayah, jumlah penduduk, kesulitan geografis dan angka kemiskinan. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk desa perlu dikelola secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan, dikarenakan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan kecurangan (fraud) dalam pengelolaannya.

Tata kelola keuangan desa yang baik dapat diwujudkan apabila kebutuhan akan variabel pendukung terpenuhi. Banyak variabel yang mampu mendukung pengelolaan desa supaya lebih baik, diantaranya adalah akuntabilitas, transparansi,

sistem akuntansi keuangan desa dan sebagainya (BPKP, 2016). Penelitian ini dilakukan pada saat penggunaan aplikasi siskeudes atau sistem keuangan desa agar lebih mudah. Dalam aplikasi siskeudes ini laporan pengelolaan keuangan desa dan dokumen yang berkaitan dalam penatausahaan bisa didapat ketika pengelola keuangan desa melakukan input sesuai dengan ketentuannya yang berlaku (BPKP, 2018).

Akuntabilitas adalah suatu proses dimana seorang pelaksana menjelaskan kebiasaan dan memberikan informasi kepada orang lain, dimana penilaian atas perilaku diberikan sebagai dari peraturan atau gagasan yang telah ditetapkan sebelumnya (Ali, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiani & Estiningrum, (2021); Latif *et al.*, (2021); Solihah *et al.*, (2022); dan Sukmawati & Nurfitriani, (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Transparansi yaitu prinsip atau asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan (Rochmansyah & Soleh, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiani & Estiningrum, (2021); Latif *et al.*, (2021); dan Solihah *et al.*, (2022) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati & Nurfitriani, (2019) yang menunjukkan bahwa transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Sistem akuntansi keuangan desa menurut Sujarweni, (2015) mengatakan bahwa akuntansi desa adalah proses pencatatan transaksi keuangan desa terkait segala transaksi yang menggunakan dana desa didukung dengan adanya bukti transaksi untuk menghasilkan output laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiani & Estiningrum, (2021) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, (2021) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Tahapan dalam pengelolaan diantaranya yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan tersebut, pemerintah desa diharuskan untuk selalu melibatkan masyarakat, meskipun hanya sekedar perwakilan masyarakat saja perwakilan masyarakat ini seperti ketua RT/RW, PKK, Karang Taruna, BPD, ataupun lembaga masyarakat lainnya.

Kabupaten Nagekeo adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Nagekeo memiliki 16 kelurahan dan 97 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Desa Ulupulu merupakan desa dengan jumlah penduduk 1.549 jiwa, terhitung dari sensus penduduk pada tahun 2020. Sedangkan luas wilayah Desa Ulupulu adalah 1.356 Ha. Penelitian ini dilakukan di Desa Ulupulu, Kecamatan

Title: Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Ulupulu: Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo)

Nangaroro, Kabupaten Nagekeo terkait dengan akuntabilitas, transparansi dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Brechmans Jawa selaku Kepala Desa, beliau menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa selama ini cukup baik walaupun terdapat beberapa kendala dimana waktu pengerjaan program yang ditetapkan desa tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Besar dana desa yang diterima dari dana transfer setiap tahun oleh setiap desa selalu berubah tergantung pada jumlah penduduk dan luas wilayah. Sedangkan, bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan pengelolaan keuangan desa dari aparatur desa kepada masyarakat, pemerintah desa selalu mengadakan pertemuan dengan BPD setiap 3 bulan dan dari BPD akan meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang ketua RT Sipi, menyatakan bahwa tidak semua kegiatan pengelolaan keuangan desa melibatkan ketua RT. Ketua RT hanya dilibatkan dalam kegiatan tertentu seperti pada saat penyampain SPJ oleh pemerintah desa jika ada undangan dari desa, dimana seharusnya dalam pengelolaan keuangan desa ketua RT harus selalu dilibatkan sebagai bentuk pertanggungjawabannya dan keterbukaan pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat yang diwakili oleh Ketua RT. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rosalina Seku selaku tokoh pemuda/i di Desa Ulupulu, beliau menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa pemuda/i tidak terlalu dilibatkan dalam kegiatan tersebut karena tidak adanya penyampaian informasi yang maksimal dari pemerintah desa kepada Tokoh Pemuda/i yang menyebabkan mereka kurang memahami tentang pengelolaan keuangan desa, dimana seharusnya dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah desa perlu melibatkan Tokoh Muda sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo setelah melakukan wawancara dan pengamatan langsung peneliti melihat permasalahan yang di hadapi pemerintah desa yaitu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang belum sepenuhnya dijalankan. Hal ini dilihat dari minimnya pengetahuan warga mengenai sistem pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan aliran dana dan pengalokasian dana yang dibuat oleh aparatur desa, karena tidak ada penyampaian informasi yang maksimal dari pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa dimana desa seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas dan transparansi pengelolannya kepada publik khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di desa ini. Oleh karena itu, peneliti mempertimbangkan akan pentingnya akuntabilitas, transparansi dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan sebagai akibat dari pengawasan yang rendah dari pemerintah pusat.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Alfiani & Estiningrum, (2021). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

yaitu sama- sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan variabel penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tempat atau lokasi dan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo pada tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melekukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Ulupulu, Kecamatan Nangarorro, Kabupaten Nagekeo)”. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa; Untuk mengetahui transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa; Untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa.

## **METODE PENELITIAN**

Di lihat dari metodenya penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian Kuntitatif adalah penelitian yang menekan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisis data dengan menggunakan prosedur statistik (Indriantoro & Supomo, 2014:121). Penelitian ini dilakukan di Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo.

Menurut Sugiyono, (2019), Sampel merupakan wakil atau sebagian yang diambil dari keseluruhan penelitian (populasi) yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* karena dlama pengambilan sampel jumlah sampel harus *reprensentative*. Rumus *slovin* digunakan untuk menentukan ukuran sampel minima jika diketahui ukuran populasi dalam tatif signifikan 10% dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n= Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

e = Margin of eror (presentase batas toleransi)

Perhitungan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{1.549}{1 + 1.549(0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.549}{16,49} = 93,93 \text{ dibulatkan menjadi } 94$$

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dapaT dirincikan sebagai berikut: Observasi, Wawancara, Kuesioner, Dokumentasi dan Studi Pustaka

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

#### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif dari suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Statistik deskriptif didasarkan pada jawaban responden yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.4:

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif**

Variabel	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Mean Teoritis	Mean Aktual	Standar Deviasi
Akuntabilitas (X1)	7 - 35	19 - 30	21	23,71	1,910
Transparansi (X2)	6 - 30	15 - 25	18	19,18	1,747
Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X3)	6 - 30	15 - 24	18	19,38	1,686
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	5 - 25	14 - 25	15	16,98	1,545

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

#### Uji Validitas

Berdasarkan hasil spss dapat diketahui bahwa setiap variabel dinyatakan valid karena  $r_{hitung}$  dari setiap variabel lebih besar dari  $r_{tabel}$  ( $r_{hitung} > 0,2028$ ). Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur dapat terpenuhi dan dapat digunakan untuk pengujian lanjutan.

#### Uji Reliabilitas

**Tabel 4.2 Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Pernyataan	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,698	7	Reliabel
Transparansi (X2)	0,691	6	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X3)	0,696	6	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,688	5	Reliabel

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 4.6 di atas diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* dari setiap variabel lebih besar dari 0,60. Jadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X3) dan Kep Pengelolaan Keuangan Desa (Y) dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur.

#### Uji Normalitas

**Tabel 4.3 Uji Normalitas**

Kolmogorov Smirnov Z	Asym.Sig	Sig	Keterangan
0,103	0,147	0,05	Normal

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa uji normalitas menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan nilai K-S sebesar 0,103 dan *asym.sig* pada 0,147 > 0,05.

Hal ini berarti data residualnya berdistribusi secara normal, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,647	1,545	Bebas Multikolinearitas
Transparansi (X2)	0,619	1,616	Bebas Multikolinearitas
Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X3)	0,681	1,469	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas nilai *tolerance* dan VIF untuk variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa lebih besar dari 0,1 dan lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 4.5 Uji Glejser**

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,201	Bebas Heteroskedastisitas
Transparansi (X2)	0,291	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X3)	0,288	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi.

**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

**Tabel 4.6 Regresi Linier Berganda**

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t <sub>hitung</sub>	Sig t
Konstanta	4,776		
Akuntabilitas (X1)	0,185	2,105	0,038
Transparansi (X2)	0,209	2,127	0,036
Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X3)	0,196	2,022	0,046

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda yang ditunjukkan tabel di atas, maka persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 4,776 + 0,185X1 + 0,209X2 + 0,196X3 + 0,05$$

### Uji t

Tabel 4.7 Uji t

Variabel Independen	Koefisien Regresi	T <sub>hitung</sub>	Sign t
Akuntabilitas (X1)	0,185	2,105	0,038
Transparansi (X2)	0,209	2,127	0,036
Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X3)	0,196	2,022	0,046
t Tabel		1,98667	

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien variabel Akuntabilitas sebesar 0,185 dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,105 > 1,98667$ ) dan tingkat signifikan  $0,038 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Artinya Semakin baiknya akuntabilitas perangkat desa mengenai keuangan akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro.

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien variabel Transparansi sebesar 0,209 dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,127 > 1,98667$ ) dan tingkat signifikan  $0,036 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa Tansparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Artinya jika transparansi diterapkan dalam setiap transaksi keuangan desa akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro.

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa sebesar 0,196 dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,022 > 1,98667$ ) dan tingkat signifikan  $0,046 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa Sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Artinya jika masyarakat mengetahui akan sistem akuntansi keuangan dengan baik akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro.

### Uji F

Tabel 4.8 Uji F

F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	Signifikan
13,616	2,70	0,000

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas dapat dilihat pada nilai F<sub>hitung</sub> sebesar 13,616. dengan nilai F<sub>tabel</sub> adalah 2,70 sehingga nilai F<sub>hitung</sub> > F<sub>tabel</sub> atau  $13,616 > 2,70$  dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel Akuntabilitas, variabel Transparansi dan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

R Square	Adjusted R Square
0,312	0,289

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas besarnya nilai *adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,289. Hal ini berarti bahwa persentase besarnya pengaruh variabel Akuntabilitas, variabel Transparansi

dan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroroa dalah sebesar 28,9% dan sisanya adalah 71,1% (100%-28,9%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien ( $\beta$ ) variabel Akuntabilitas sebesar 0,185 dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,105 > 1,98667$ ) dan tingkat signifikan  $0,038 < 0,05$ . Artinya Semakin baiknya akuntabilitas perangkat desa mengenai keuangan akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro.

Tansparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien ( $\beta$ ) variabel Transparansi sebesar 0,209 dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,127 > 1,98667$ ) dan tingkat signifikan  $0,036 < 0,05$ . Artinya jika transparansi diterapkan dalam setiap transaksi keuangan desa akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro.

Sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien ( $\beta$ ) variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa sebesar 0,196 dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,022 > 1,98667$ ) dan tingkat signifikan  $0,046 < 0,05$ . Artinya jika masyarakat mengetahui akan sistem akuntansi keuangan dengan baik akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro.

Secara bersama-sama (simultan) variabel Akuntabilitas, variabel Transparansi dan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Desa berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 13,616. dengan nilai F tabel adalah 2,70 sehingga nilai F hitung  $>$  F tabel atau  $13,616 > 2,70$  dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2(9), 222–229.
- Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa*, 2(1), 1–13.
- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232.
- Faridah, S. B. (2015). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(4), 1–20.

Title: Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Ulupulu: Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo)

- Ghozali, I. (2019). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12. BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Latif, A., Savitri, E., & Susilatri, S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(5), 183–192.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Neny, R. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Perangkat Desa Se Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka). *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2), 106–132.
- Ningsih, L. P. P. S. (2021). Pengaruh sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 183–198.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014). Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jakarta*, 1–16.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jakarta*, 72(10), 1–13.
- Rochmansyah, & Soleh. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia, Bandung.
- Saputra, B. T. T., Suyanto, S., & Ali, K. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 1(1), 17–29.
- Solihah, F., Inapty, B. A., & Suryantara, A. B. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 136–154.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Andi Offset, Yogyakarta* (Vol. 53, Issue 9).
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Biaya*. Edisi Pertama. In *Pustaka Baru Press, Yogyakarta*.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan UMKM*, 1(2), 52–66.
- Superdi, S. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung). *Riau University*, 1(1), 20.